

Dilema Pembangunan Politik: Pertumbuhan Ekonomi Vs Keadilan Politik Di Era Modernisasi

Political Development Dilemma: Economic Growth Vs Political Justice In The Era Of Modernization

Muhammad Akhdan Rahendra¹, Nita Aribah Hanif²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 1
Hal : 10-16
Diterbitkan : 01 Juli 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dilema pembangunan politik di Indonesia yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak diiringi oleh peningkatan keadilan politik yang merata di era modernisasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menelusuri bagaimana proses modernisasi dan industrialisasi berdampak pada distribusi kekuasaan, partisipasi politik, dan akses terhadap keadilan. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan, dominasi oligarki, dan kelemahan kelembagaan yang menghambat terwujudnya keadilan politik. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh modernisasi dan industrialisasi, tanpa diimbangi dengan kebijakan yang pro-keadilan dan penguatan institusi demokrasi, justru memperkuat struktur kekuasaan yang tidak setara dan mengancam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembangunan inklusif yang memperhatikan distribusi kekayaan dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif pada keadilan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Dilema Pembangunan Politik, Pertumbuhan Ekonomi, Modernisasi.

Abstract

Korespondensi
No Handphone : 0821-2452-2460
E-mail :
muhamadakhdanrahenda@gmail.com

This research analyzes the dilemma of political development in Indonesia which is characterized by rapid economic growth but is not accompanied by an increase in equitable political justice in the era of modernization. Using a qualitative approach with case studies, this research explores how the process of modernization and industrialization impacts the distribution of power, political participation, and access to justice. The findings show that there are significant economic disparities, oligarchic dominance, and institutional weaknesses that hinder the realization of political justice. Economic growth driven by modernization and industrialization, without being balanced by pro-justice policies and strengthening democratic institutions, actually strengthens unequal power structures and threatens sustainable development. This research highlights the importance of inclusive development that pays attention to the distribution of wealth and fair access for all levels of society so that economic growth can have a positive impact on political justice in Indonesia.

Keywords: Dilemma of Political Development, Economic Growth, Modernization.

Latar Belakang

Era modernisasi ditandai dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi¹. Namun, di balik gemerlap kemajuan tersebut, seringkali tersembunyi dilema pembangunan yang kompleks. Salah satu dilema yang krusial adalah tarik-menarik antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang menjadi tujuan utama banyak negara di era modernisasi, tidak selalu beriringan dengan terwujudnya keadilan politik. Bahkan, dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan sosial dan politik, memicu konflik, dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang adil dan representatif.

Jurnal ini akan membahas dilema pembangunan politik tersebut, khususnya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh proses modernisasi dan industrialisasi berdampak pada keadilan politik. Analisis ini akan menelaah berbagai faktor yang berkontribusi pada dilema ini, termasuk distribusi kekayaan yang tidak merata, lemahnya penegakan hukum, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap partisipasi politik yang berarti. Lebih lanjut, tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan terwujudnya keadilan politik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Modernisasi dan industrialisasi, sebagai proses transformatif yang mendasar, membawa perubahan signifikan pada struktur ekonomi dan sosial suatu negara². Pertumbuhan ekonomi yang menjadi konsekuensi dari proses ini seringkali dirayakan sebagai indikator

keberhasilan pembangunan. Namun, fokus yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek penting lainnya, yaitu keadilan politik. Keadilan politik, yang meliputi akses yang setara terhadap hak-hak politik, partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadi prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Tanpa keadilan politik, pertumbuhan ekonomi hanya akan menguntungkan segelintir kelompok, sementara mayoritas masyarakat tetap terpinggirkan dan menderita ketidakadilan³.

Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik menciptakan dilema pembangunan yang serius⁴. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, tanpa keadilan politik, pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk kesenjangan sosial, memicu konflik, dan menghambat stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dan holistik, yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik, guna menciptakan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif juga menggunakan pendekatan literature review yang dilakukan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dan memberikan landasan bagi analisis data empiris⁵. Sumber literatur yang digunakan meliputi:

1. Berita dan artikel media massa: Berita dan artikel dari media massa kredibel.

akan memberikan perspektif tentang dinamika politik yang terjadi selama proses legislasi. Analisis ini akan fokus pada framing dan narasi yang dibangun media.

2. Jurnal ilmiah dan publikasi akademik: Jurnal dan publikasi akademik yang relevan akan digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan memperkaya analisis. Fokus analisis literatur akan diarahkan pada teori-teori pengambilan keputusan politik, analisis kebijakan publik, dan studi parlemen.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Pustaka akan dilakukan untuk mengamati dinamika politik dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui sumber berita nasional yang ada baik dari media online/cetak.

Teknik Analisis Data:

1. Reduksi data: Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah.
2. Penyajian data: Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi.
3. Penarikan kesimpulan: Mencari dan menemukan pola, tema, dan hubungan antar data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan akan diverifikasi dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori dan literatur yang telah dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa di era modernisasi, Indonesia mengalami dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan keadilan politik yang merata. Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak krisis ekonomi 1998, ditandai dengan peningkatan PDB per kapita dan penurunan angka kemiskinan absolut. Namun, kemajuan ekonomi ini tidak diiringi dengan peningkatan keadilan politik yang merata. Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, terutama dalam hal budaya politik dan kebebasan sipi. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam demokrasi prosedural, demokrasi substansial mengalami kemunduran.

Kesenjangan ekonomi yang tinggi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Penguasaan aset yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok mengancam demokrasi dan mobilitas sosial. Kelembagaan politik di Indonesia masih lemah, ditandai dengan dominasi kekuatan eksekutif dan kurangnya fungsi pengawasan parlemen. Praktik *value extraction* yang mengandalkan otot dan keringat (*perspiration*) lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok, sementara praktik *value creation* (otak) yang merajut potensi bangsa untuk menghasilkan karya bernilai tambah tinggi dan berdaya saing masih kurang berkembang.

Dilema ini mengancam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kesenjangan ekonomi yang tinggi dan lemahnya keadilan politik dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Pembatasan kebebasan dan demokrasi substansial dapat menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang dan mengancam stabilitas ekonomi. Dominasi oligarki dan praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa

rasio Gini Indonesia mencapai 0,386, yang berarti bahwa kesenjangan kekayaan antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti kasus korupsi e-KTP dan kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan kelemahan kelembagaan politik dan kurangnya akuntabilitas di Indonesia. Penguasaan media oleh sejumlah orang atau kelompok membuat oligarki semakin mengkeram dan menghambat demokrasi

Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik di era modernisasi merupakan tantangan serius bagi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan keadilan politik yang merata, agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Pemerintah perlu fokus pada penguatan kelembagaan politik, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan mendorong praktik value creation yang inklusif.

1. Teori Pembangunan

- Modernisasi: Teori modernisasi menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah pada kemajuan dan kesejahteraan. Modernisasi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi. Namun, teori modernisasi juga dikritik karena dianggap terlalu berpusat pada negara maju dan tidak mempertimbangkan konteks lokal negara berkembang⁶.
- Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Teori ini berpendapat bahwa negara berkembang terjebak dalam siklus ketergantungan terhadap negara maju⁷. Ketergantungan ini dibentuk melalui sistem perdagangan global yang tidak adil, investasi asing yang eksploratif, dan dominasi teknologi dari negara maju. Teori ini dapat menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang tidak selalu beriringan dengan peningkatan keadilan politik dan kesejahteraan masyarakat.
- Teori Pasca-Pembangunan (Post- Development Theory): Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori pembangunan konvensional yang dianggap tidak sensitif terhadap konteks lokal dan budaya. Teori pasca-pembangunan menekankan pentingnya pembangunan yang berpusat pada masyarakat, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan menghormati nilai-nilai lokal.

2. Teori Politik:

- Demokrasi: Demokrasi merupakan sistem politik yang menekankan pada kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, dan persamaan hak. Keadilan politik dalam konteks demokrasi berarti bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, mendapatkan akses terhadap keadilan, dan menikmati hak-hak sipil mereka.
- Teori Keadilan: Teori keadilan membahas tentang prinsip-prinsip yang mendasari distribusi sumber daya dan peluang yang adil di masyarakat. Teori keadilan dapat membantu kita memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan distribusi kekayaan dan peluang yang adil bagi semua warga negara.

3. Konsep Relevan

- Kesenjangan

Ekonomi: Kesenjangan ekonomi merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang

tinggi dapat mengancam stabilitas politik dan sosial, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

- Oligarki: Oligarki adalah sistem politik yang dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elit. Dominasi oligarki dapat menghambat partisipasi politik, memperkuat korupsi, dan menghambat keadilan politik.
- Korupsi: Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk kesenjangan ekonomi.

Modernisasi vs Ketergantungan: Teori modernisasi dan teori ketergantungan menawarkan perspektif yang berbeda tentang pembangunan. Teori modernisasi menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai kunci kemajuan, sementara teori ketergantungan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seringkali dihambat oleh struktur global yang tidak adil. **Demokrasi dan Keadilan:** Demokrasi merupakan sistem politik yang ideal untuk mewujudkan keadilan politik. Namun, dalam praktiknya, demokrasi dapat dihambat oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan ekonomi, dominasi oligarki, dan korupsi.

Pasca-Pembangunan dan Keadilan: Teori pasca-pembangunan menekankan pentingnya pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan memperhatikan keadilan sosial. Teori ini dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diiringi dengan peningkatan keadilan politik dan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi dan industrialisasi, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, memiliki dampak yang kompleks terhadap keadilan politik. Di satu sisi, peningkatan pendapatan dan standar hidup yang diiringi dengan munculnya kelas menengah dapat memperkuat basis demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Institusi yang lebih kuat dan profesional juga dapat membantu menjamin tegaknya hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, memicu konflik sosial, dan mengancam stabilitas politik.

Dominasi oligarki yang muncul akibat konsentrasi kekayaan dan kekuatan di tangan segelintir orang dapat menghambat partisipasi politik dan memperkuat korupsi, mengikis keadilan politik. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai dalih untuk membatasi kebebasan sipil dan menekan oposisi, mengorbankan demokrasi demi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjamin keadilan politik. Untuk mencapai keadilan politik yang sejati, pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat institusi demokrasi, dan melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok elit. Penguatan institusi demokrasi, seperti lembaga peradilan, lembaga pengawasan, dan media massa, sangat penting agar dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negara dan menjamin tegaknya hukum. Langkah-langkah untuk membatasi kekuatan oligarki, seperti dengan memperkuat regulasi dan transparansi dalam dunia usaha, serta mendorong partisipasi politik yang lebih luas, juga diperlukan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak bagi semua lapisan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, sehat, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan menerapkan strategi yang tepat,

pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pendorong bagi keadilan politik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu fokus pada penguatan kelembagaan politik, seperti meningkatkan fungsi pengawasan parlemen, memperkuat sistem checks and balances, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Pemerintah perlu fokus pada pengurangan kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah perlu mendorong praktik value creation yang inklusif, dengan fokus pada pengembangan inovasi, teknologi, dan industri kreatif yang berdaya saing tinggi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh proses modernisasi dan industrialisasi tidak selalu beriringan dengan peningkatan keadilan politik. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kesenjangan ekonomi yang tinggi dan dominasi oligarki masih menjadi isu serius yang menghambat partisipasi politik yang adil. Kelemahan kelembagaan politik juga memperburuk situasi, mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan politik yang sejati, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan memperkuat institusi demokrasi.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis ini mungkin terlalu fokus pada faktor-faktor makroekonomi, sementara aspek-aspek mikroekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan individu dan komunitas bisa menjadi fokus yang lebih mendalam. Kedua, meskipun penelitian ini menyoroti dampak negatif dari oligarki, kurangnya penjelasan tentang solusi potensial untuk mengatasi masalah ini dapat mengurangi nilai praktis dari temuan. Terakhir, penggunaan data yang lebih komprehensif dan beragam sumber informasi akan memperkuat argumen dan validitas penelitian.

Berdasarkan temuan dan kritik yang ada, beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut dan kebijakan publik dapat diajukan. Pertama, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak spesifik dari berbagai kebijakan ekonomi terhadap keadilan politik di tingkat lokal, guna memahami dinamika yang lebih mendalam antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan politik. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, upaya untuk memperkuat institusi demokrasi harus menjadi prioritas, termasuk reformasi sistem pemilihan, pengawasan terhadap korupsi, dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif terhadap keadilan politik dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andika, Andika. "Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama- Agama* 2, no. 2 (2022): 129–39.
- Andriani, Windy. "Penggunaan Metode Sistematik Literatur Review Dalam Penelitian Ilmu Sosiologi." *Jurnal PTK Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2021).
- HERYON, Fransiskus. "Dilema Relasi Antara Demokrasi Dan Kapitalisme: Tinjauan Kritis-Komprehensif Melalui Politik Pembangunan." IFTK Ledalero, 2024.
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 78–90.
- Prabowo, Tri Bagus, and Rezya Agnesica Sihaloho. "Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi Dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 72–82.
- Probosiwi, Ratih. "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development)." *Natapraja* 3, no. 1 (2015).
- Soelaiman, Darwis A, and Rahmad Syah Putra. "Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam." *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*, 2019.